

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Uni Eropa selama kurang lebih 6 dekade telah mampu merubah keadaan dan kondisi negara-negara Eropa dan diharapkan bisa membangun kemandirian ekonomi negara-negara Eropa yang porak poranda pasca Perang Dunia II. Secara perlahan Uni Eropa mampu menumbuhkan/memperbaiki kompetitivitas produksi industri pasca perang, beranjak untuk saling beradu keunggulan produk, hingga akhirnya meluas pada tingkat moneter dan mata uang. Awal pembentukan Uni Eropa (dalam konteks Masyarakat Ekonomi Eropa) tidak lepas dari bantuan Amerika Serikat baik langsung maupun tidak langsung.

Tapi pada saat UE (atau MEE jika konteksnya baru awal berdiri) didirikan, tujuan utamanya adalah agar negara-negara yang tergabung dalam MEE berusaha untuk dapat fokus memperbaiki dan membangun ekonomi. Negara-negara Eropa pada saat itu belum mampu untuk memikirkan pula isu keamanan, sementara keadaan pada masa itu penuh ketegangan Perang Dingin. Oleh karena itu, negara-negara Eropa yang tergabung dalam MEE akhirnya mempercayakan segala keamanan Eropa kontinental kepada NATO. Terutama dalam hal ini AS sebagai salah satu anggota NATO paling berpengaruh. Dengan demikian, praktis negara-negara MEE tak mungkin melepaskan diri dari hutang budi terhadap NATO yang setidaknya hingga Perang Dingin berakhir, berusaha mengamankan negara-negara Eropa, agar negara-negara Eropa fokus membangun perekonomian.

Dinamika hubungan antara NATO dan Eropa kerap kali terjadi bahkan di saat NATO masih sangat memiliki peran signifikan dalam menjaga keamanan Eropa. Pandangan bahwa NATO yang selalu dipersepsikan “milik” AS dan Inggris, mengemuka pada dekade 60-an. Hal ini terlihat saat Perancis keluar dari komando utama NATO. Sebagai catatan, keluar dari komando utama NATO bukan berarti keluar dari keanggotaan NATO.

Sikap keluar yang dijalankan Perancis di masa Charles de Gaulle ini, karena de Gaulle merasa bahwa NATO terlalu “trans atlantik”. Terlihat dalam pengambilan kebijakannya yang seringkali didominasi oleh AS dan Inggris. Padahal sebagai negara Eropa kontinental, Perancis ingin agar isu keamanan Eropa dibicarakan lebih bersama oleh semua negara anggota NATO. Bukan selalu mengikuti kebijakan keamanan menurut perspektif AS dan Inggris. Selain itu, Gaulle merasa NATO melemahkan kedaulatan Perancis.¹ Apalagi, Inggris juga belum bergabung dengan MEE saat itu (baru bergabung pada 1971), tapi dianggap terlalu merasa benar untuk menentukan kebijakan keamanan di Eropa kontinental, sementara letak Inggris terpisah dari kontinental Eropa. Baru pada 2009 Perancis menyatakan kembali bergabung dalam komando utama NATO.

Keluhan Charles de Gaulle ini tidak membuahkan tindakan konkrit akan terbentuknya organisasional tentara bersama di Eropa diluar NATO. Meski demikian, pada awal dekade 70-an, yaitu pada 1972, diadakan *Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE) sebagai pertanda mulai dipikirkannya suatu konsep keamanan di Eropa yang terpisah dari payung NATO.

¹ http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/03/090311_francenato.shtml diakses pada hari Rabu 31 Oktober 2012 pukul 17.40 wib

Kemudian pada 1975, tercapai *Helsinki Final Act* yang menyatukan komitmen bersama untuk menjaga terjaminnya hak asasi, kebebasan, dan *Human Security* lainnya, sejalan kerjasama pengamanan perbatasan. Sekalipun masih amat sederhana dalam upaya mengembangkan pertahanan keamanan, CSCE dan *Helsinki Act* inilah yang perlahan nantinya berujung pada ESDP (*European Security and Defense Policy*). Maka setelah CSCE, hadir pula upaya lebih integratif dalam isu perbatasan dengan *Schengen Agreement* (1987) dan terbentuknya OSCE (*Organization of Security and Cooperation in Europe*, 1994, berkantor di Vienna). Beberapa instrumen ini yang kemudian berpengaruh dalam garis besar ESDP hingga kini.

Harus diakui, makin menguatnya upaya menjalankan sendiri kontrol keamanan di Eropa, mengemuka seiring makin stabil/makmurnya perekonomian negara-negara UE pasca Perang Dingin. Apalagi, dengan usainya Perang Dingin, negara-negara anggota UE merasa bahwa akan butuh waktu amat lama bagi Rusia dan negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya untuk memulihkan politik, ekonomi, dan militernya. Seperti saat negara-negara Eropa butuh waktu lama untuk bangkit pasca PD II. Terlebih, beberapa negara UE mampu mengembangkan industri militer secara mandiri. Misalnya Jerman (Eurofighter, kadang bekerjasama dengan Perancis) atau Swedia (jet tempur yang dibuat pabrikan Saab).

Negara-negara UE sadar bahwa mereka punya hutang amat besar terhadap AS terkait keamanan yang disediakan AS menopang UE selama Perang Dingin. Tanpa komitmen dari Amerika Utara, negara-negara Eropa akan kekurangan keyakinan yang memungkinkan mereka untuk berintegrasi dan mengatasi

permusuhan secara historis. Amerika Serikat tetap menjadi pembawa perdamaian bagi Eropa dan tanpa kehadiran Amerika Serikat, negara-negara Eropa akan menasionalisasikan ulang kebijakan pertahanan mereka dan kembali kepada kerjasama pakta militer yang rapuh seperti di masa lalu.² Tapi negara-negara UE juga ingin agar tak selamanya bergantung sepenuhnya dengan NATO. Maka konflik di Bosnia menjadi titik awal betapa Eropa harusnya memiliki wadah keamanan sendiri yang terpisah dari NATO.

Dalam beberapa kasus, ada beberapa kejadian dimana pasukan NATO yang diterjunkan terlampaui sedikit dan atau terlambat datang, sehingga tentara Yugoslavia (atau Serbia untuk sebutan saat ini) terlanjur lebih dulu melakukan “ethnic cleansing” di beberapa tempat di Sarajevo dan Bosnia. Beberapa kasus tersebut menjadi tamparan bagi Eropa yang selalu digambarkan sebagai benua yang maju, makmur, beradab. Karena dengan kejadian “ethnic cleansing” di Bosnia dan sekitarnya, negara-negara Eropa dianggap tidak mampu atau tidak berani melakukan inisiatif lebih jauh untuk mencegah pembantaian. Kritik yang hadir, bukan karena negara-negara UE tak “enak hati” dengan NATO. Tapi karena negara-negara UE saat itu masih berhati-hati dengan kemampuan militer Rusia yang mendukung Yugoslavia jika Yugoslavia dalam keadaan terdesak.

Seusai konflik di Bosnia, negara-negara UE mulai lebih serius membicarakan seperti apa dijalankannya ESDP kedepannya. Pertama, bagaimana menyinergikan ESDP dengan berbagai unsur militer tiap negara UE, juga dengan

² Michael C. Williams, *Culture and Security ; Symbolic Power and the Politics of International Security*. (New York: Routledge, 2007) hlm, 71

OSCE, dan dengan NATO sendiri. Kedua, bagaimana cakupan menjalankan ESDP, apakah menyangkut murni wilayah seluruh anggota UE, atau seluruh negara Eropa, atau juga mengaitkan dinamika di area sekitar Eropa. Hal ini karena negara-negara Eropa meyakini, jika stabilitas di Eropa bisa terjaga, maka Eropa sudah seharusnya menyikapi segala dinamika di luar Eropa yang sekiranya bisa mengancam stabilitas keamanan Eropa. Terkait isu inilah, sering terjadi ketidaksepakatan sesama anggota UE.

Bagi Jerman dan Perancis sebagai penopang utama ESDP, kedua negara ini tidak sepakat bila keamanan Eropa terlalu dikaitkan dengan keharusan negara-negara anggota NATO membantu AS menyerang Irak. Sementara Inggris, Italia, dan Spanyol menilai bahwa membantu AS dalam melakukan serbuan ke Irak adalah penting untuk lebih memastikan stabilitas regional di Eropa. Yaitu dengan bertempur langsung ke “pusat masalah” (dalam hal ini Irak) dengan payung NATO. Disinilah terjadi perdebatan bagaimana memastikan efektivitas ESDP.

Kemudian, meskipun perang dingin sudah lama berakhir, namun persaingan dan perseteruan antara Amerika Serikat dan Rusia masih terus berlanjut. Memang kekuatan Rusia saat ini, sebagai negara pewaris Uni Soviet tidak terlalu signifikan disbanding dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh Uni Soviet pada masa perang dingin. Akhir perang dingin sekaligus mengakhiri konstelasi kekuatan dua kutub atau *bipolar* dan menghasilkan Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemoni dan dominan dalam percaturan politik internasional.

Amerika Serikat dan Rusia seringkali berbeda pendapat dalam melihat permasalahan dan isu-isu internasional. Seperti dalam melihat krisis di Timur

Tengah semisal Irak, Rusia memiliki pandangan yang berbeda dengan Amerika Serikat terkait agresi militer yang dilakukan ke negeri seribu malam tersebut. Rusia terus berupaya mengejar ketertinggalan mereka dari pesaing utamanya pada masa perang dingin tersebut. Sisa-sisa perseteruan itu tidak jarang mengancam kondisi dan stabilitas keamanan di kawasan Eropa. Isu-isu utama perseteruan itu adalah permasalahan penanaman rudal balistik di sekitar Eropa oleh Rusia dan Amerika Serikat.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian skripsi ini akan dikaji mengenai kebijakan beberapa negara anggota Uni Eropa dan NATO yang dapat mempengaruhi pola interaksi dan dinamika hubungan politik antara UE dan NATO dalam menyikapi berbagai permasalahan internasional. Untuk itu, dalam skripsi ini akan coba dibahas pertanyaan penelitian mengenai:

- Bagaimana dinamika hubungan politik antara NATO dan Uni Eropa terhadap keamanan internasional pasca peristiwa 9/11 mulai tahun 2001-2009?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Mengetahui dinamika hubungan militer antara negara-negara NATO dan Uni Eropa dalam menyikapi suatu permasalahan yang berkaitan dengan keamanan internasional

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

- Memahami dinamika hubungan politik yang terjadi di antara negara-negara anggota NATO dan Uni Eropa serta kaitannya terhadap keamanan internasional

1.5 Tinjauan Pustaka

Banyak literatur telah menjelaskan mengenai dinamika hubungan politik yang terjadi di antara negara-negara Uni Eropa yang mayoritas juga merupakan anggota dari NATO. Beberapa literatur yang dijadikan tinjauan untuk penelitian ini diantaranya Heiko Meiertons, *The Doctrine of US Security Policy; An Evaluation Under International Law*³ yang menjelaskan mengenai doktrin kebijakan keamanan Amerika Serikat dalam menghadapi dinamika politik internasional untuk menjaga keamanan nasionalnya. Salah satu doktrin keamanan Amerika Serikat adalah doktrin yang dicetuskan oleh Presiden Truman untuk membendung penyebaran paham dan pengaruh komunisme di Eropa Barat pasca berakhirnya perang dunia II dengan membentuk pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO). Isu-isu yang didiskusikan dalam buku ini adalah doktrin-doktrin keamanan yang diterapkan oleh Amerika Serikat untuk menjaga keamanannya. Doktrin-doktrin keamanan Amerika Serikat yang utama diantaranya Doktrin *defensive* (isolasi), Doktrin Monroe, doktrin Stimson, dan Doktrin Truman. Pembentukan NATO pada mulanya merupakan kebijakan Amerika Serikat untuk

³ Heiko Meiertons, *The Doctrine of US Security Policy; An Evaluation Under International Law*. (New York: Cambridge University Press, 2010)

menjaga kepentingannya di kawasan Eropa yang seiring perkembangan waktu negara-negara Eropa merasa perlu memiliki suatu kebijakan keamanan yang lebih mandiri.

Michael C. Williams, *Culture and Security ; Symbolic Power and the Politics of International Security*⁴ menjelaskan mengenai konsep keamanan dan power dan dinamika perubahannya dari masa sebelum perang dingin menuju masa pasca perang dingin. Buku ini juga membahas hubungan historik antara budaya, strategi, dan keamanan. Michael C. Williams membahas mengenai pendapat Emmanuel Kant dalam perdebatan pasca perang dingin dan perdebatan mengenai relevansi NATO setelah kurang lebih empat dekade eksistensinya dalam dunia internasional. Berakhirnya perang dingin tidak diikuti dengan bubarnya NATO. Buku ini menggambarkan konsep *symbolic power* dan ranah budaya keamanan dalam menjelaskan relevansi keberlangsungan peran dan aliansi NATO. Berakhirnya perang dingin membuat NATO secara otomatis tidak memiliki ancaman eksternal pasca Pakta Warsawa bubar setelah akhir perang dingin. Kondisi ini menyebabkan banyak perdebatan mengenai eksistensi keberlangsungan NATO pasca perang dingin. Perubahan bentuk aliansi NATO menjadi komunitas keamanan Eropa merupakan salah satu penjelasan mengenai relevansi dan eksistensi NATO pasca perang dingin. Selain itu, NATO merupakan simbol dari power Amerika Serikat di Eropa dan itu yang menyebabkan NATO masih bertahan meskipun mengalami perubahan peran dan bentuk.

⁴ *Op.cit*, Michael C. Williams

Zalvin Prakoso, *CFSP dan Integrasi Keamanan Uni Eropa*⁵ fokus pada upaya Eropa dalam membentuk komunitas keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Eropa. Keberadaan dua organisasi keamanan besar di Eropa yaitu NATO dan UE/WEU menjadi fokus pembahasan dalam artikel tersebut. Keberadaan dua organisasi keamanan tersebut mempunyai peran dan fungsi identik. Pasca berakhirnya perang dingin, argument utama pembentukan organisasi keamanan tersebut sudah tidak relevan lagi saat ini. Akhir dari perang dingin memunculkan ancaman baru bagi keamanan yang tidak hanya berfokus pada seputar isu wilayah tetapi sudah mencakup isu-isu non-militer. Dengan adanya bentuk baru dari ancaman keamanan pasca perang dingin, maka diperlukan penanganan baru yang khusus untuk direspon oleh NATO maupun EU/WEU agar keberadaannya akan tetap menjadi relevan dengan kondisi yang berbeda dari awal pembentukan organisasi keamanan ini.

1.6 Kerangka Teori

NEO REALISME

Dalam bahasan tata hubungan internasional, penekanan atas kekuatan negara dalam prakteknya menjadi suatu bagian koinsiden dalam memahami bagaimana tata hubungan antar negara berlangsung⁶.

⁵ <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/4108118138.pdf> diakses pada hari Senin, 12 Nopember 2012 pukul 14.17 wib

⁶ Fred Chernoff. 2007. *Theory and Metatheory in International Relations : Concepts and Contending Accounts*. New York : Palgrave Macmillan, hal 57 – 61

Hal ini selaras untuk memahami kebutuhan hampir semua negara (termasuk tiap pemimpin negara) yang sebetulnya memiliki kecenderungan neorealist dalam pengambilan kebijakan.

Kenneth Waltz memberi fondasi dalam memahami realisme secara struktural, dan kemudian berkembang menjadi neorealisme. Menurut Waltz, negara adalah aktor terpenting dalam hubungan internasional dan negara ialah representasi aktor yang utuh, tunggal & rasional, meski negara bukan aktor satu-satunya. Sistem internasional bersifat anarkis. Untuk melindungi kepentingannya sendiri dalam lingkungan itu, negara berusaha memaksimalkan kekuasaannya. maka dalam hal neorealisme, suatu negara merasa harus bertahan dengan menonjolkan prinsip-prinsip / citra kebijakan negara itu sendiri, agar negara lain di sekitarnya (yang satu kawasan) tidak memandang remeh. Tapi karena tiap negara bisa saja saling mengambil prinsip-prinsip neorealisme, hadir kecenderungan bahwa tiap negara bersikeras menegaskan pilihan kebijakannya yang memiliki image tersendiri, dan seringkali berlanjut pada upaya ingin mempengaruhi prinsip pengambilan kebijakan negara lain di sekitarnya.

Dengan berpijak pada peran negara sangat menentukan terkait implikasinya (yang sebetulnya tidak bisa digeneralisasi) dalam pergaulan internasional, pada dasarnya neorealisme mencerminkan seberapa besar kepercayaan diri aktor negara dalam memahami yang terjadi disekitarnya. Dalam sejarah pergolakan antar manusia, bisa dilihat bahwa sejatinya, negara diarahkan sebagai akumulasi kekuatan kolektif untuk meraih power yang lebih besar, tekanan mempertahankannya, dan hasrat memperluas power yang mungkin diraih, dalam

menghadapi kekuatan lain berupa aktor serupa bernama negara, dengan militer sebagai simbol kekuatan faktualnya⁷.

Jika mengaitkan kemungkinan faktor neorealis dari individu yang menjadi pemimpin tertinggi suatu negara dan besar kecilnya pihak ini mempengaruhi eskalasi konflik, artinya siapapun yang menitikberatkan peran pengambilan keputusan dalam suatu negara, meyakini bahwa rasionalitas yang selayaknya dipahami adalah tiap negara lain merupakan ancaman eksistensi bagi negara tersebut. Artinya, neorealisme cenderung berfokus pada perspektif bagaimana tiap negara menggambarkan apakah mereka merasa aman atau tidak. Bisa dikatakan, sekuritisasi menjadi “isu yang menyatukan” tiap penduduk suatu negara dalam melihat seberapa besar negara memainkan isu tersebut dalam mengukur interaksinya dengan negara lain. Hal ini secara bersamaan sebetulnya menimbulkan perdebatan akan kelayakan suatu negara menentukan posisinya secara sepihak dalam memandang negara lain⁸.

Realisme mencapai pembedaannya saat muncul tokoh-tokoh seperti Niccolò Machiavelli, atau pada pengaruh yang terbangun dari pemikiran Hans J. Morgenthau dan George Kennan dalam memberi telaah terhadap politik pengambilan kebijakan dari seorang kepala negara. Yang ingin disampaikan realisme adalah bukti bahwa sejauh negara bisa mengakumulasi sebesar mungkin segala daya dan kapasitasnya, maka cara itu yang paling sederhana untuk mewujudkan seberapa besar power yang bisa direbut. Masalahnya, dinamika

⁷ Karen A. Mingst, 2003, *Essential of International Relations*, New York : Norton, hal 65 – 67

⁸ Neta C. Crawford. 2002. *Argument and Change in World Politics: Ethics, Decolonization, and Humanitarian Intervention*. New York : Cambridge University Press, hal 352

negara tidak hanya sekuritisasi, tapi juga berbagai dinamika internal negara itu. maka dinamika terbaru dalam percaturan politik internasional, oleh pemikir realis, menyampaikan penyempurnaan argument dengan menghadirkan neorealisme. hal ini sebagai konsekuensi makin rumitnya dinamika kawasan tertentu dan mempengaruhi tiap- tiap Negara dalam region tersebut. Atau dalam kata lain, neorealisme membenarkan hadirnya kerumitan sekuritisasi baik di tingkat Negara maupun tingkat regional karena satu sama lain saling berebut dalam konteks Struggle for Power dan bagaimana tiap Negara membangun citra sebagai Negara yang kuat secara politik meski ditengah region yang bergejolak.

Kenneth Waltz dalam neorealismenya, berusaha menelaah lebih detail penyebab faktual yang mendorong kebutuhan akan sekuritisasi domestik suatu negara dan alasan perlunya suatu pemimpin negara mengakumulasi *power* yang cenderung bertindak terlalu radikal merespon suatu masalah domestik. Waltz menilai bahwa dinamika kehidupan berbangsa menjadi semakin kompleks seiring berjalannya waktu.

Pada linier waktu tersebut, muncul berbagai rantai aktivitas tiap negara yang bisa dikatakan tumpang tindih, bisa juga diartikan sebagai reaksi berantai, terhadap proses pengambilan keputusan oleh negara lain. Penelaahan tersebut bermuara pada keyakinan adanya semacam struktur dalam hubungan antar negara, yang dinamikanya dipengaruhi keseimbangan tidaknya peran dari tiap – tiap negara yang membentuk struktur tersebut.

Dalam menghadapi tantangan yang timbul dari relasi antar negara, seorang kepala negara yang realis, (menurut Waltz) justru sering menempatkan objek

keresahan di tingkat domestik agar dibawa ke dalam isu antarnegara⁹. Terlebih jika seorang kepala negara ini berada di kawasan yang memiliki arsitektur regionalisme yang amat rapi, dan jika kebetulan negara yang dipimpinnya memiliki keunggulan/amat disegani di kawasan itu, maka seringkali kebijakan di regionalisme tersebut amat dipengaruhi kebijakan negara/pemimpin negara tertentu yang secara berani/terbuka menyampaikan keresahan yang dijalaninya di tingkat domestik, agar direspon pula oleh negara lain melalui mekanisme dalam regionalisme tersebut. Kepala negara yang secara terbuka dan mungkin cenderung berlebihan dalam merespon suatu isu domestik (misal isu imigran) ialah tipikal kepala negara yang menekankan pentingnya dirinya menjalankan negara yang dipimpinnya berpijak pada realisme atau neorealisme.

Melihat kerangka berpikir ini, jika kemudian timbul situasi konflik hingga klimaksnya perang antara NATO dan Rusia, hal ini akibat dipaksakannya keinginan dari 2 kubu yang berperang. Kubu yang cenderung lebih unggul (atau jauh lebih unggul) dalam sumber daya perang, akan merasakan kepuasan atau kemenangan mutlak jika berhasil menghancurkan rivalnya secara telak, karena merasa rival mereka jauh lebih minim dalam sumber daya perang. Dalam kata lain, secara gengsi pihak ini tak mau sebatas mengalahkan begitu saja, tapi benar-benar memerangi rival mereka yang lebih lemah agar benar-benar hancur. Konteks kekuatan (power) yang dipakai pun menjadi berlebihan, dan tak mengindahkan keberadaan warga sipil di medan laga.

⁹ Kenneth Waltz, *International Structure, National Force, & the Balance of Power*

Di sisi lain, menyadari kebuasan berperang dari pihak lawannya yang punya sumber daya perang jauh lebih besar, pihak yang lebih lemah merasa berhak pula melakukan segala cara agar perang yang timpang (asimetri) ini tak bisa dimenangkan lawan mereka. Saat pihak lawan diyakini melakukan segala cara atau melakukan pemakaian kekuatan secara berlebihan untuk memerangi mereka agar benar – benar hancur, maka pihak yang lebih lemah ini juga ikut melakukan segala cara untuk tetap bertahan dalam peperangan atau mengimbangi pihak lawan yang sebetulnya jauh lebih kuat. Saat kedua pihak yang berperang melakukan segala cara, akhirnya perang menjadi tak terkendali dan tak lagi hadir kepatuhan terhadap hukum perang, karena warga sipil pun turut menjadi korban, atau malah juga dipersenjatai sebagai tambahan sumber daya perang diantara pihak yang bertikai.

POLA INTERAKSI INTERNASIONAL

Pola interaksi antar negara dalam politik internasional tidak lepas dari konflik dan kerjasama. Konflik antar negara tidak lepas dari manuver para negara tersebut untuk memperoleh kepentingan ekonomi dan pengaruh dalam politik internasional serta memperoleh dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Diplomasi pun juga merupakan salah satu upaya untuk memperoleh pengaruh dalam politik internasional itu sendiri. Sedangkan pola interaksi lainnya dalam hubungan internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh para aktor negara. Namun kerjasama global masih merupakan proses sekunder dengan kompetisi antar negara masih menjadi fokus dominan dalam interaksi antar negara, tetapi

secara perlahan kerjasama antar negara perlahan-lahan mulai tumbuh dalam percaturan politik internasional.¹⁰

Berdasarkan pada pola interaksi antar negara tersebut, negara-negara UE harus menyadari bahwa kebijakan NATO jangan sampai mengooptasi posisi UE dalam membentuk opini terkait cara mengamankan kontinen Eropa. Saat kemudian kebijakan NATO cenderung dikooptasi cara pikir AS dalam memandang isu keamanan di Eropa, negara-negara Uni Eropa justru berada dalam bahaya, karena sudah terlalu sering kebijakan NATO dianggap sebagai provokasi yang perlahan mengancam posisi Rusia. Diperparah, karena jumlah anggota NATO amat banyak, Rusia memandang bahwa terjadi asimetri yang besar antara NATO dengan poros militer di sekitarnya, utamanya Rusia. Hal ini membuat Rusia makin terpacu untuk mengakselerasi penambahan armada militer agar tak mengalami asimetri.

Di sinilah UE harusnya menyadari bahwa kemandirian kebijakan sudah saatnya dilakukan dan berusaha tak terus tergantung dengan NATO. Kesalahan fatal kebijakan NATO yang misalnya amat menyinggung Rusia, hanya akan membuat keamanan Eropa makin tak stabil. Disaat justru negara – negara Eropa punya momentum memandirikan kebijakan mereka karena juga memiliki perlengkapan militer yang memadai dan tak harus tergantung dengan kemampuan militer AS.

¹⁰ John T. Rourke. *International Politics on the World Stage*. Brooks/Cole. hlm, 23

1.7 Asumsi

Dinamika hubungan politik antara NATO dan Uni Eropa sering mengalami perbedaan kebijakan yang mendasar, disebabkan karena beberapa faktor:

1. Pemaksaan sikap AS dalam NATO untuk mengambil kebijakan strategis militer di Eropa dan di sekitar Eropa yang justru kontraproduktif bagi kepentingan negara-negara Eropa sendiri
2. Kebuntuan kebijakan militer di Eropa, sehingga salah satu atau kesemua pihak yang terlibat dalam NATO mengambil sikap tak lagi kooperatif dan atau saling memaksakan kehendak
3. Kebijakan NATO terkadang bertentangan dengan kebijakan dan kepentingan politik maupun militer beberapa negara Uni Eropa yang notabene sebenarnya juga merupakan anggota NATO seperti Perancis yang menentang agresi militer NATO dan Amerika Serikat ke Irak. Dinamika hubungan politik ini tentu berpengaruh terhadap stabilitas keamanan di Eropa dan juga kemananan internasional secara menyeluruh.

1.8 Alur Pemikiran



1.9 Metode Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini melalui data sekunder. Yaitu pemakaian studi literatur, yang mengutamakan data tertulis dalam bentuk cetak seperti buku, jurnal, majalah, koran, diktat kuliah. Serta melengkapinya dengan data tertulis bentuk elektronik seperti e-book dan website. Sehingga jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan analitis dengan tujuan menggambarkan secara detail dan terperinci mengenai dinamika hubungan politik militer antar aktor yang dikaji dalam penelitian ini.

1.10 Sistematika Penulisan / Rencana Penelitian

Skripsi ini dirinci dalam 4 bagian utama, antara lain :

1. Bab I adalah bagian pendahuluan, isinya memaparkan beberapa bagian antara lain latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan / rencana penelitian
2. Bab II merupakan pembahasan yang pertama. Penulis memakai judul bab **“Perubahan Konstelasi Keamanan Internasional Pasca Peristiwa WTC 2001-2009”** Bagian ini akan membahas perubahan konstelasi dan lingkungan keamanan internasional setelah terjadinya peristiwa 9/11
3. Bab III merupakan pembahasan yang kedua. Penulis memakai judul bab **“Dinamika Hubungan NATO-Uni Eropa Terhadap Keamanan Internasional Pasca WTC 2001-2009”** Bagian ini akan membahas mengenai pola interaksi antara NATO-Uni Eropa dan dampaknya terhadap keamanan internasional
4. Bab IV berisi penutup yang menjabarkan kesimpulan pembahasan dalam skripsi ini